



SEKRETARIAT DAERAH
KAB. BONE



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



Jln. Jend Ahmad Yani



<https://setda.bone.go.id/>

KATA

PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 dapat diselesaikan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), hal ini juga merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Good and Clean Government.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 merupakan hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone yang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya. Hal ini sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2024 dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dalam meningkatkan kinerja serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang akan datang.



DRS. ANDI FAJARUDDIN, MM.
NIP. 196509151986031018

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone perlu adanya Akuntabilitas kinerja yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur dan dapat diuji.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Perubahan Tahun 2024- 2026 dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perubahan Tahun 2024-2026. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone 2024-2026.

Matriks Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bone dalam mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Bone periode 2018-2023 adalah “Masyarakat Kabupaten Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera (MaBeSSa)”.

Sedangkan Misinya :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Berdasarkan keenam Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tersebut, Sekretariat Daerah berupaya mendukung Misi yang pertama, yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)”. Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang mencakup 4 indikator sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 dengan 1 Indikator Sasaran

Capaian indikator Kategori Nasional hasil Penilaian LPPD Kabupaten dalam kategori Berhasil, yaitu tercapai 98% dengan realisasi (2,94 = Sedang) dari target (3,01 = Tinggi).

2. Sasaran Strategis 2 dengan 1 Indikator Sasaran

Capaian indikator Tingkat Inflasi Daerah dalam kategori Sangat Berhasil, yaitu tercapai 154% dengan realisasi sebesar 1,11 dari target 2.4

IKHTISAR EKSEKUTIF

3. Sasaran Strategis 3 dengan 3 Indikator Sasaran

Capaian Indikator :

- a. Capaian Indikator Nilai SAKIP Oleh APIP dalam kategori Berhasil, yaitu tercapai 101% dengan realisasi (A = 80,55) dari target (A = 80).
- b. Capaian Indikator Survey kepuasan Masyarakat/IKM dalam kategori Tidak Baik, yaitu tercapai 106% dengan realisasi (B = 80,87) dari target (B = 76,61)

Dari uraian Ikhtisar Pencapaian Capaian Kinerja 2024 diatas terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang mencakup 4 (empat) Indikator kinerja, maka dapat diketahui bahwa, 3 (tiga) Indikator kinerja dalam predikat **Berhasil** yakni **Kategori Nasional hasil Penilaian LPPD Kabupaten** dengan capaian kinerja **98%**, **Nilai SAKIP Oleh APIP** dengan capaian kinerja **101%** dan **Kategori Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian Kinerja 106%**. 1 (satu) indikator dalam predikat **Sangat Berhasil** yakni **Tingkat Inflasi Daerah** dengan capaian kinerja **154%**. Dengan demikian Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone pada tahun 2024 dengan Rata-Rata Capaian Kinerja 114% telah Mencapai **Sangat Berhasil**.

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga
melayani
bangsa**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GRAFIK	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. UMUM	
B. ORGANISASI	
C. ISU STRATEGIS	
D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. TUJUAN DAN SASARAN	
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA	
D. PERJANJIAN KINERJA	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISAS	
B. REALISASI ANGGARAN	
BAB IV PENUTUP	44
A. SIMPULAN UMUM	
B. KENDALA PELAKSANAAN DAN UPAYA MENGATASI	
LAMPIRAN	48
KALEIDOSKOP	49

DAFTAR TABEL

Tabel.1.1 Komposisi ASN Menurut Pangkat / Golongan (Tahun 2024)	6
Tabel.2.1 Tujuan, Sasaran RPD 2024-2026	11
Tabe 2.1.1 Tujuan dan, Sasaran , Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone	14
Tabel.2.2 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024	17
Tabel.2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2024	18
Tabel. 2.4 Standar Penilaian Kinerja	19
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	22
Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2024-2026	23
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target pembangunan daerah Renstra 2024 -2026	26
Tabel 3.4 Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya	27
Tabel 3.5 Tabel Ikhtisar Pencapaian Capaian Kinerja 2024	28
Tabel 3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
Tabel 3.7 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja	36
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran	43

DAFTAR GRAFIK

Grafik .1.1 Pegawai Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

6

Grafik .1.2 Inflasi Watampone Tahun 2024

31

BAB I

A. UMUM

B. ORGANISASI

C. ISU STRATEGIS

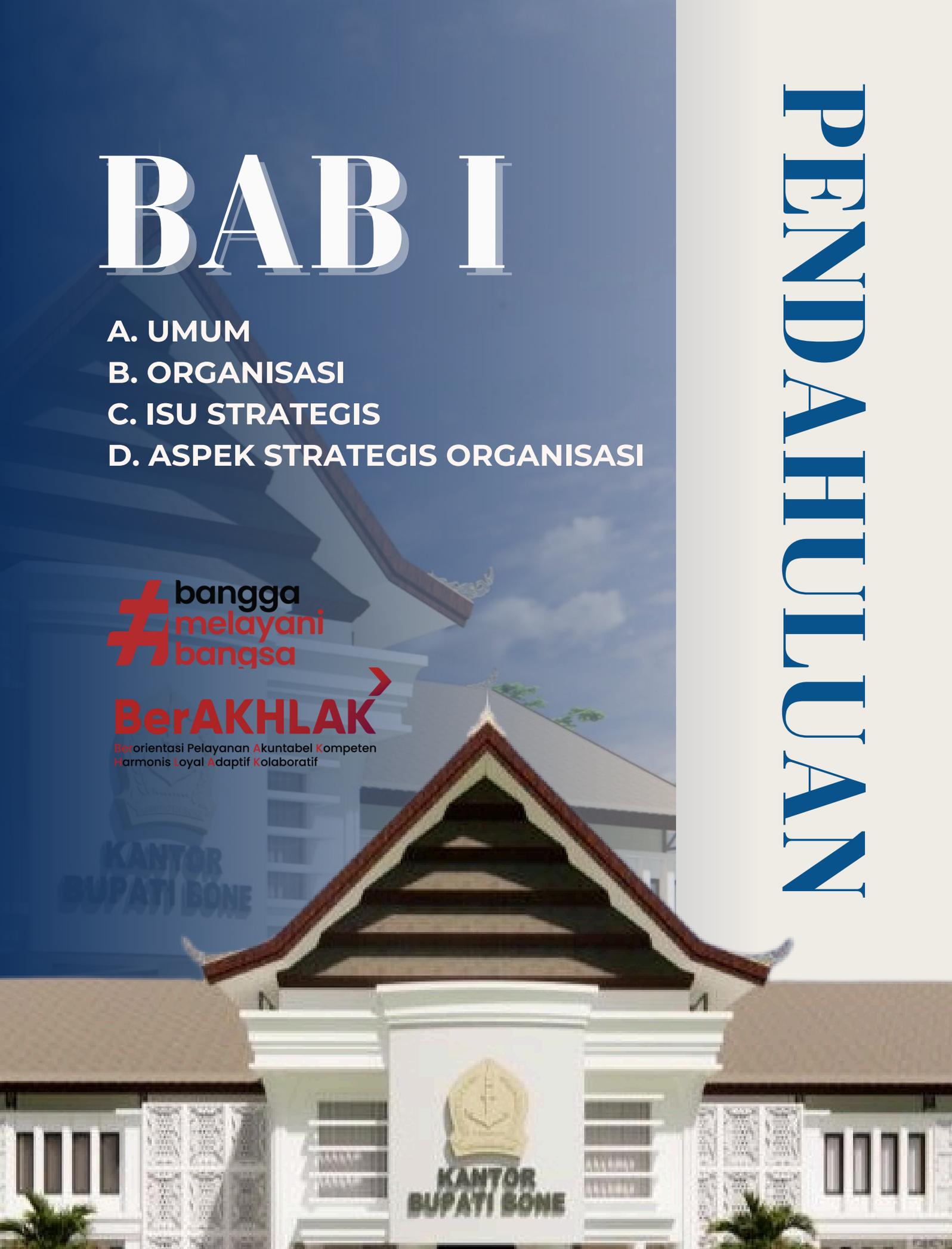
D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

 bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PENDAHULUAN





A. UMUM

1. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sampai saat ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Cipta Karya. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah.

Proses penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Sekretariat Daerah Laporan Kinerja (LKj) menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja (LKj) tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

TUJUAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE

1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Sekretariat Daerah Yang Baik Dan Bersih Serta Layanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi
2. Mewujudkan Stabilitas Prekonomian Daerah

LKj Sekretariat Daerah (Setda) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj SKPD Setda merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

B. ORGANISASI

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

Pembentukan Sekretariat Daerah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Setda diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

a. Tugas

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

SASARAN 1

“Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Yang Profesional”



Scan Barcode
untuk melihat SOTK
Setda Kab. Bone



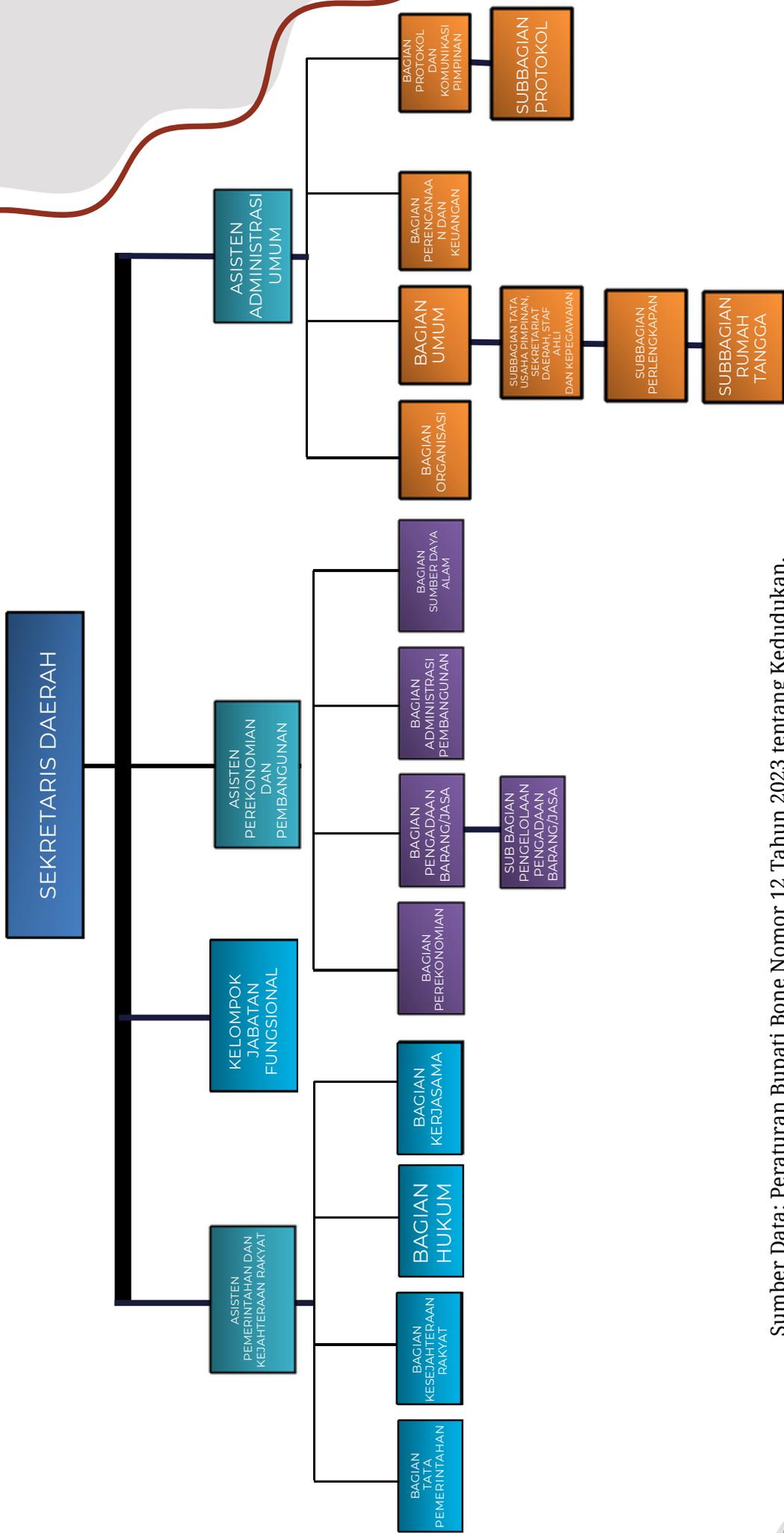
b. Fungsi

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Bone memiliki susunan organisasi sebagai berikut:



Sumber Data: Peraturan Bupati Bone Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

GAMBAR 1 : STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH

Tabel 1.1

Komposisi ASN Menurut Pangkat / Golongan (Tahun 2024)

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah
1	Golongan IV :	
	Pembina Utama Madya (IV/d)	1
	Pembina Utama Muda (IV/c)	3
	Pembina Utama TK. I (IV/b)	7
	Pembina (IV/a)	13
	Jumlah	24
2	Golongan III :	
	Penata TK. I (III/d)	11
	Penata (III/c)	22
	Penata Muda TK. I (III/b)	8
	Penata Muda (III/a)	12
	Jumlah	53
3	Golongan II :	
	Pengatur TK. I (II/d)	3
	Pengatur (II/c)	6
	Pengatur Muda TK. I (II/b)	2
	Pengatur Muda (II/a)	0
4	Kelas IX (PPPK)	11
	Jumlah	22
	JUMLAH TOTAL	99

Sumber Data: Daftar Urutan Kependidikan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024

Grafik 1.1



Sumber : Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kab.Bone

C. ISU STRATEGIS

01 Penataan kelembagaan, dalam hal ini permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone menjalankan tugas dan fungsinya yaitu:

- Masih terdapatnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi beberapa bagian dengan dinas/instansi lain;
- Masih kurangnya tingkat koordinasi antar bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bone;
- Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil kinerja

02 Peningkatan kualitas SDM aparatur, permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone yaitu:

- Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
- Manajemen anggaran yang tidak tepat guna dalam rangka peningkatan SDM aparatur.
- Manajemen ASN terkait dengan penempatan pegawai belum optimal yg ditandai dengan masih terbatasnya jumlah pegawai di beberapa unit kerja lingkup Sekretariat Daerah

03 Peningkatan kualitas pelayanan publik, permasalahan yang dihadapi antara lain:

- Sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan pelayanan Publik;
- Kurangnya jiwa melayani untuk kepentingan publik;
- Pemahaman Peraturan Perundang-undangan, permasalahan yang dihadapi : adanya Peraturan Per Undang-Undangan yang saling tumpang tindih.



Sesuai Renstra Perubahan
Tahun 2024-2026
Scan Barcode

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH

1



Data Online Manajemen Penatausahaan Aset (DOMPet ASET)

Aplikasi berbasis web yang di gunakan untuk melakukan pendataan barang milik daerah pada sekretariat daerah



Media sosial ini dibuat agar masyarakat dapat langsung mengajukan pertanyaan terkait masalah yang terjadi dilapangan atau mengenai hal-hal yang bersangkutan yang menjadi rana bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan sekretariat daerah

2



TAMPING
(PerTanyaan Masyarakat ditanggaPi Pimpinan secara langsung)



3



SIPAKAINGE
(Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah) pada

Aplikasi berbasis web yang di gunakan untuk melakukan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Bagian Organisasi sekretariat daerah



bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK

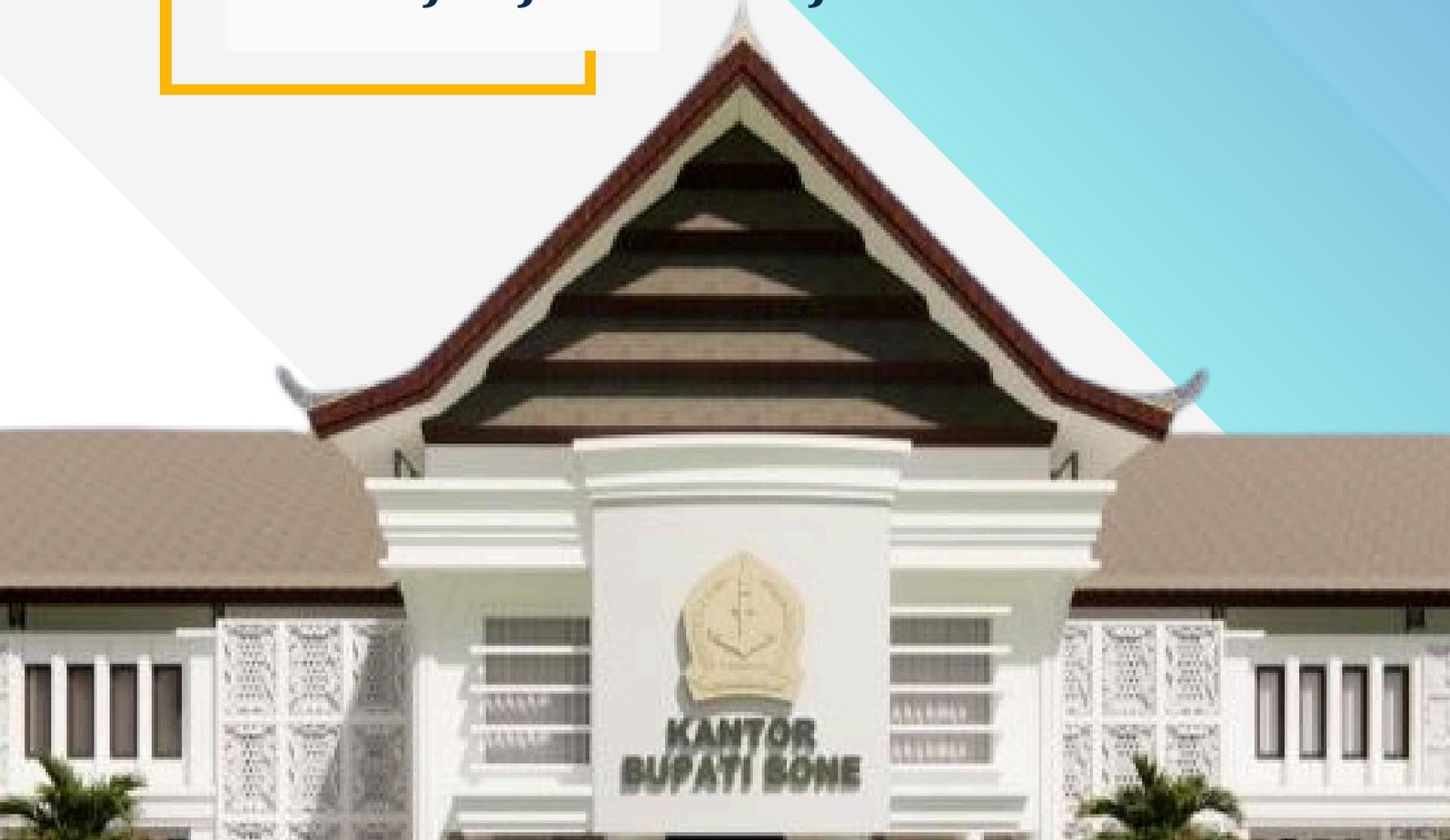
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

- A. TUJUAN DAN SASARAN
- B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- C. INDIKATOR KINERJA UTAMA
- D. PERJANJIAN KINERJA



A. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, tujuan akan mengarahkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Oleh karena itu, rumusan tujuan yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas tata kelola Sekretariat Daerah yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.
- Mewujudkan Stabilitas Prekonomian Daerah



2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan sasaran merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Sasaran dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Daerah yang Profesional
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah
- Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Daerah



TUJUAN DAN SASARAN

01 TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas tata kelola Sekretariat Daerah yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.
2. Ewujudkan Stabilitas Prekonomian Daerah

02 SASARAN

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Daerah yang Berkualitas
2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah
4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran RPD 2024-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Sekretariat Daerah serta Layanan publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang Profesional	Kategori Nasional hasil Penilaian LPPD Kabupaten	(3,01 - 4) = Sangat Tinggi	(3,01 - 4) = Sangat Tinggi	(3,01 - 4) = Sangat Tinggi
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai Predikat SAKIP Oleh APIP	A (80-90)	A (80-90)	A (80-90)
			Survey kepuasan Masyarakat (IKM)	B (76,61-88,30)	B (76,61-88,30)	B (76,61-88,30)
2	Mewujudkan Stabilitas Perekonomian Daerah	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Daerah	Tingkat Inflasi Daerah	2.4	2.4	2.4

Sumber data : Dokumen Renstra Perubahan 2024-2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Bone



B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. STRATEGI

	01	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah
Mengkoordinasikan strategi arah kebijakan ekonomi dan pembangunan daerah kepada unsur pemerintah, komunitas, akademisi dan pelaku usaha (quadruple-helix)	02	
	03	Menetapkan rencana kerja secara terpadu dan sistematis dalam bentuk rencana aksi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam program dan kegiatan
Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui manajemen perangkat daerah	04	



2. ARAH KEBIJAKAN

- Fasilitasi bimtek. Sosialisasi, supervisi, dan asistensi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, evaluasi kinerja pelayanan serta mendorong peningkatan IKM kecamatan dan Kelurahan.
- Mendorong Kecamatan dan Kelurahan untuk meningkatkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- Melaksanakan penataan produk hukum daerah dan meningkatkan budaya tertib hukum.
- Peningkatan penyelarasan produk hukum untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang insentif dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.
- Fasilitas pembinaan kerukunan umat beragama dan penanggulangan permasalahan social masyarakat.
- Formulasi kebijakan di bidang ekonomi, membentuk kelembagaan forum komunikasi dengan pihak swasta maupun pemerintah, dan setiap skpd wajib melaporkan dan berkordinasi kegiatan terkait bidang ekonomi serta perusahaan swasta/ BUMN.
- Fasilitasi kebijakan Daerah pengadaan barang dan jasa yang kondusif dan komperhensif serta mewujudkan kineja dan efisiensi anggaran daerah yang di belanjakan melalui pengadaan barang dan jasa, mengurangi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan sumber daya manusia yang professional dan bermartabat.
- Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Melaksanakan analisis jabatan dan peningkatan kompetensi aparatur sesuai kebutuhan.
- Meningkatkan Pelayanan bidang kehumasan dan keprotokoleran
- Melaksanakan evaluasi, analisis jabatan dan beban kerja organisasi perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan serta dan semua SKPD di Kab Bone membuat Dokumen pendukung SAKIP (renstra, IKU, dan LAKIP)
- Meningkatkan Pelayanan ketatalaksanaan sesuai tugas dan fungsi.
- Meningkatkan transparans dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bone dalam periode 2024-2026, sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel. 2.1.1
Tujuan dan, Sasaran , Strategi dan Kebijakan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bone**

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1.		2		3		4	
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Sekretariat Daerah serta Layanan publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Daerah yang Berkualitas	1.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah	1.	Fasilitasi bimtek. Sosialisasi, supervisi, dan asistensi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, evaluasi kinerja pelayanan serta mendorong peningkatan IKM kecamatan dan Kelurahan.
						2.	Mendorong Kecamatan dan Kelurahan untuk meningkatkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
						3.	Mengembangkan budaya kerja yang disiplin, konsultatif, koordinasi dan kebersamaan tanggungjawab sebagai tim work
						4.	Penyusunan regulasi tentang SOP penyelenggaraan kerjasama daerah.
						5.	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Bone.
						6.	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah





					7.	Melaksanakan analisis jabatan dan peningkatan kompetensi aparatur sesuai kebutuhan
					8.	Meningkatkan Pelayanan bidang kehumasan dan keprotokoleran
	2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	1.	Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui manajemen perangkat daerah	1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
			2.	Meningkatkan keselarasan Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Perangkat Daerah dan Perencanaan Sektoral	2.	Melaksanakan evaluasi, analisis jabatan dan beban kerja organisasi perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan serta semua SKPD di Kab Bone membuat Dokumen pendukung SAKIP (renstra, IKU, dan LKJIP)
			3.	Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparatur pemerintah	1.	Meningkatkan Pelayanan ketatalaksanaan sesuai tugas dan fungsi
			4.	Menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan kepada publikkatkan kualitas dan keprofesionalan aparatur pemerintah	2.	Menerbitkan kebijakan mengenai peningkatan pelayanan publik untuk mendorong terciptanya kualitas pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel.

2.	Mewujudkan Stabilitas Perekonomian Daerah	1.	Terwujudnya Stabilitas Perekonomian Daerah	1.	Mengkoordinasikan arah kebijakan ekonomi dan pembangunan daerah kepada unsur quadro helix (Pemerintah, Swasta, Akademisi dan Komunitas)	1.	Formulasi kebijakan di bidang ekonomi, membentuk kelembagaan forum komunikasi dengan pihak swasta maupun pemerintah, dan setiap skpd wajib melaporkan dan berkordinasi kegiatan terkait bidang ekonomi serta perusahaan swasta/ BUMN.
						2.	Fasilitasi, kordinasi dan asistensi kebijakan di bidang pembangunan infrastuktur dan RUP
						3.	Fasilitasi, kordinasi dan asistensi kebijakan di bidang pembangunan infrastuktur dan Potensi Sumber Daya Alam
						4.	Fasilitasi kebijakan Daerah pengadaan barang dan jasa yang kondusif dan komperhensif serta mewujdkan kineja dan efisiensi anggaran daerah yang di belanjakan melalui pengadaan barang dan jasa, mengurangi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan sumber daya manusia yang professional dan bermartabat.



Sumber data : Dokumen Renstra Perubahan 2024-2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Bone

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bone ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.

Tabel. 2.2
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (IKU)	TARGET KINERJA TAHUN		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Sekretariat Daerah serta Layanan publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang Profesional	Kategori Nasional hasil Penilaian LPPD Kabupaten	(3,01 - 4) = Sangat Tinggi	(3,01 - 4) = Sangat Tinggi	(3,01 - 4) = Sangat Tinggi
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai Predikat SAKIP Oleh APIP	A (80-90)	A (80-90)	A (80-90)
			Survey kepuasan Masyarakat (IKM)	B (76,61-88,30)	B (76,61-88,30)	B (76,61-88,30)
2	Mewujudkan Stabilitas Perekonomian Daerah	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Daerah	Tingkat Inflasi Daerah	2.4	2.4	2.4

Sumber data : Dokumen Renstra Perubahan 2024-2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Bone



Scan Barcode



D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.



Penandatanganan Perjanjian Kinerja serentak Tahun 2024

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
1	2	3	4	5
<i>Meningkatkan kualitas tata kelola sekretariat daerah yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi</i>				
Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang Profesional	Kategori Nasional Hasil Penilaian LPPD Kabupaten	(3,01) = Tinggi	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	11,388,471,800
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai Predikat SAKIP Oleh APIP	A (80-90)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29,167,908,491
	Survey Kepuasan Masyarakat/IKM	B (76,61-88,30)		
<i>Mewujudkan Stabilitas Prekonomian Daerah</i>				
Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Daerah	Tingkat Inflasi Daerah	2.4	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1,411,235,840
Jumlah				41,967,616,131.00

Sumber data : Dokumen Renstra Perubahan 2024-2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Bone



Scan Barcode





E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Standar Penilaian Kinerja

Nilai% 1	Pencapaian 2
110 keatas	Sangat Tercapai/ Sangat Berhasil
90 ≤ x < 110	Tercapai/ Berhasil
60 ≤ x < 90	Cukup Tercapai/ Cukup Berhasil
x < 60	Tercapai/ Berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B. REALISASI ANGGARAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Sekretariat Daerah menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Sekretariat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Pengukuran kinerja Sekretariat Daerah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah meliputi:

Tujuan 1:

Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Sekretariat Daerah Yang Baik Dan Bersih Serta Layanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi, dengan indikator:

- Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran 1.1:

Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang Profesional, dengan indikator:

- Kategori Nasional hasil Penilaian LPPD Kabupaten

Sasaran 1.2:

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah, dengan indikator:

- Nilai SAKIP Oleh APIP
- Survey Kepuasan Masyarakat/IKM

Tujuan 2:

Mewujudkan Stabilitas Prekonomian Daerah

Sasaran 1:

Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Daerah, dengan indikator:

- Tingkat Inflasi Daerah

Capaian kinerja tahun anggaran 2024 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2024 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

1. TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Capaian kinerja tahun anggaran 2024 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Sekretariat Daerah Yang Baik Dan Bersih Serta Layanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi					
Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang Profesional	Kategori Nasional hasil Penilaian LPPD Kabupaten	(3,01-4) = Tinggi	2.94	98%	Berhasil
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai Predikat SAKIP Oleh APIP	A (80-90)	80.55	101%	Berhasil
	Survey kepuasan Masyarakat (IKM)	B (76,61-88,30)	80.87	106%	Baik
Mewujudkan Stabilitas Prekonomian Daerah					
Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Daerah	Tingkat Inflasi Daerah	2.4	1.11	154%	Sangat Berhasil
Rata-rata				114%	Sangat Berhasil

Sumber Data: Realisasi Pengukuran Kinerja yang telah di Perjanjikan sesuai IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, rata-rata capaian kinerja Tahun Anggaran 2024 sebesar 114%. Dengan demikian Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone yang telah diperjanjikan pada tahun 2024 mencapai target atau berada dalam kategori Baik (Tercapai/Berhasil).

2.REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024-2026

Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (RPD) Sekretariat Daerah 2024 – 2026. Adapun realisasi dan capaian kinerja Sekretariat Daerah apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Tahun 2024-2026

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2021	Target Kinerja			Target Kinerja			
			2022	2023	2024	2024	2022	2023	2024
1	2	3	6	7	8	9	12	13	14
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Sekretariat Daerah Yang Baik Dan Bersih Serta Layanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi									
Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang Profesional	Kategori Nasional hasil Penilaian LPPD Kabupaten	(3,74) = Sangat Tinggi	(3,74) = Sangat Tinggi	(2,94) = Sedang	(2,94) = Sedang	(3,01-4) = Tinggi	124%	98%	98%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai Predikat SAKIP Oleh APFIP	A (85)	A (85)	BB (78,95)	A (80,55)	A (80-90)	121%	99%	101%
	Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (82,07)	A (80,89)	D (41,82)	B(80,87)	B (76,61-88,80)	109%	52%	106%
Mewujudkan Stabilitas Prekonomian Daerah									
Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Daerah	Tingkat Inflasi Daerah	2.26	5.52	2.84	1.11	2.4	69%	131%	154%

Sumber Data: Realisasi Pengukuran Kinerja yang telah di Perjanjikan sesuai IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024-2026 indikator kinerja terhadap 3 (Tiga) sasaran strategis yang mencakup 4 (Empat) Indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja 114% atau dalam kategori Sangat Berhasil, dengan penjelasan sebagai berikut :

Sasaran 1.1:

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Sekretariat Daerah Yang Baik Dan Bersih Serta Layanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran 1.1:

Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang Profesional

Indikator 1.2.1 : Kategori Nasional hasil Penilaian LPPD Kabupaten

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui Perbandingan antara

Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya sebagai berikut :

- Realisasi kinerja Tahun 2022 telah Memenuhi Target yang telah ditetapkan yaitu kategori Tinggi = (3,7420) dengan capaian kinerja 124%.

- Realisasi kinerja Tahun 2023 telah Mencapai Target yang telah ditetapkan yaitu kategori Sedang = (2,94) dengan capaian kinerja 98%.
- Realisasi kinerja Tahun 2024 telah Mencapai Target yang telah ditetapkan yaitu kategori Sedang = (2,94) dengan capaian kinerja 98%.

Sasaran 1.2:

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah

Indikator 1.2.1: Nilai SAKIP Oleh APIP

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya sebagai berikut:

- Realisasi Kinerja Tahun 2022 Nilai SAKIP Oleh APIP yaitu A (85) Melebihi Target dengan capaian kinerja 121%.
- Realisasi Kinerja Tahun 2023 Nilai SAKIP Oleh APIP yaitu BB (78,95) Mencapai Target dengan capaian kinerja 99%.
- Realisasi Kinerja Tahun 2024 Nilai SAKIP Oleh APIP yaitu BB (80,55) Mencapai Target dengan capaian kinerja 101%.



Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)



Rapat Orientasi Penyusunan LPPD

- Realisasi kinerja Tahun 2023 telah Mencapai Target yang telah ditetapkan yaitu kategori Sedang = (2,94) dengan capaian kinerja 98%.
- Realisasi kinerja Tahun 2024 telah Mencapai Target yang telah ditetapkan yaitu kategori Sedang = (2,94) dengan capaian ki

Indikator 1.2.2: Survey Kepuasan Masyarakat/IKM

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya sebagai berikut:

- Realisasi Kinerja Tahun 2022 Survey Kepuasan Masyarakat/IKM yaitu B (80,89) telah Melebihi Target dengan capaian kinerja 109%.
- Realisasi Kinerja Tahun 2023 Survey Kepuasan Masyarakat/IKM yaitu D (41,32) tidak Mencapai Target dengan capaian kinerja 47%.
- Realisasi Kinerja Tahun 2024 Survey Kepuasan Masyarakat/IKM yaitu B (80,87) Mencapai Target dengan capaian kinerja 106%.



Tujuan 2

: Mewujudkan Stabilitas Prekonomian Daerah

Sasaran 1.

Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Daerah

Indikator 1.1 : Tingkat Inflasi Daerah

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya sebagai berikut:

- Realisasi Kinerja Tahun 2022 Tingkat Inflasi Daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu di tingkat 5,52 sudah Mencapai Target dengan capaian kinerja 69%.
- Realisasi kinerja Tahun 2023 Tingkat Inflasi Daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu di Tingkat 2,84 sudah Melampaui Target dengan capaian kinerja 131%.
- Realisasi kinerja Tahun 2024 Tingkat Inflasi Daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu di Tingkat 1,11 sudah Melampaui Target dengan capaian kinerja 154%.



Target pembangunan daerah Renstra



Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target pembangunan daerah Renstra 2024 -2026

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPD	Tahun		
			2022	2023	2024
1	2	3	6	7	8
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Sekretariat Daerah Yang Baik Dan Bersih Serta Layanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi					
Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang Profesional	Kategori Nasional hasil Penilaian LPPD Kabupaten	(3,01) = Tinggi	(3,74) = Sangat Tinggi	(2,94) = Sedang	(2,94) = Sedang
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Oleh APIP	A (80-90)	A (85)	BB (78,95)	A (80,55)
	Survey kepuasan Masyarakat (IKM)	B (76,61-88,30)	A (80,89)	D (41,32)	B(80,87)
Mewujudkan Stabilitas Prekonomian Daerah					
Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Daerah	Tingkat Inflasi Daerah	2.4	5.52	2.84	1.11

Sumber Data: Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa 3 (Tiga) sasaran strategis dengan 4 (Empat) indikator kinerja terhadap target jangka menengah adalah sebagai berikut:

- Realisasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone pada tahun 2024 dengan target jangka menengah pada sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang Profesional dengan indikator Kategori Nasional hasil Penilaian LPPD Kabupaten dalam Kategori Berhasil atau Mencapai Target.
- Realisasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone pada tahun 2024 dengan target jangka menengah pada sasaran Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah dengan indikator Tingkat Inflasi Daerah dalam kategori Sangat Berhasil atau Melampaui Target.
- Realisasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone pada tahun 2024 dengan target jangka menengah pada sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah dengan dengan 2 indikator Nilai Predikat Sakip oleh APIP dan Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Kategori Berhasil atau Mencapai Target

4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Sekretariat Daerah dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2024	Standar Nasional		
				Target 2024	Realisasi 2024	
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Sekretariat Daerah Yang Baik Dan Bersih Serta Layanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi					
		Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang Profesional	Kategori Nasional hasil Penilaian LPPD Kabupaten	2.94	Tidak Ada	Tidak Ada
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai Predikat SAKIP Oleh APIP	A (80,55)	Tidak Ada	Tidak Ada
Survey kepuasan Masyarakat (IKM)	B(80,87)		Tidak Ada	Tidak Ada		
2	Mewujudkan Stabilitas Prekonomian Daerah					
		Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Daerah	Tingkat Inflasi Daerah	1.11	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber Data: Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026

Berdasarkan tabel 3.4 di atas tidak dapat disandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal, karena Sekretariat Daerah berada dalam Unsur Pendukung Penunjang Urusan Pemerintahan.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5
Tabel Ikhtisar Pencapaian Capaian Kinerja 2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Rata-rata Capaian	Predikat			
				>110	90= \leq s/d<110	60= \leq s/d<90	<60
				Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Sekretariat Daerah Yang Baik Dan Bersih Serta Layanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi							
Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang Profesional	Kategori Nasional hasil Penilaian LPPD Kabupaten	98%	107%		√		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Oleh APIP	101%	107%		√		
	Survey kepuasan Masyarakat (IKM)	106%	87%		√		
Mewujudkan Stabilitas Prekonomian Daerah							
Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Daerah	Tingkat Inflasi Daerah	154%	118%	√			

Sumber data : Lembar Kerja Perhitungan Capaian IKU

Berdasarkan data pada Tabel 3.5 Tabel Ikhtisar Pencapaian Capaian Kinerja 2024 diatas, terhadap 3 (Tiga) sasaran strategis yang mencakup 4 (Empat) Indikator kinerja, maka dapat diketahui bahwa 3 (Tiga) Indikator kinerja dalam predikat Berhasil yakni Kategori Nasional hasil Penilaian LPPD Kabupaten dengan capaian kinerja 98%,Nilai Predikat SAKIP oleh APIP dengan capaian kinerja 101%, Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian Kinerja 106%. Sedangkan untuk sasaran Pembangunan Ekonomi Daerah Sangat Berhasil yakni Nilai Tingkat Inflasi Daerah dengan capaian kinerja 154%. Dengan demikian Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone pada tahun 2024 Memenuhi Target.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Sekretariat Daerah Yang Baik Dan Bersih Serta Layanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi

Tujuan 2: Mewujudkan Stabilitas Prekonomian Daerah

Dari Tabel 3.5 Tabel Ikhtisar Pencapaian Capaian Kinerja 2024 di atas, terlihat bahwa pencapaian tujuan 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Sekretariat Daerah Yang Baik Dan Bersih Serta Layanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dan Tujuan 2. Mewujudkan Stabilitas Prekonomian Daerah, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan predikat Berhasil, dan Sangat Berhasil yang mempunyai nilai capaian rata-rata 105% yang didukung oleh 3(Tiga) sasaran dengan jumlah indikator kinerja 4 (Empat) yang menunjukkan predikat Berhasil dan Sangat Berhasil, yaitu mempunyai nilai capaian 114%.

BEBERAPA HAL YANG MENJADI PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SEBAGAI BERIKUT:

Sasaran 1.1 Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang Profesional

Definisi: Kategori Nasional hasil Penilaian LPPD Kabupaten ialah hasil Penilaian LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Kategori Nasional hasil Penilaian LPPD Kabupaten dalam kategori Berhasil, yaitu tercapai 98% dengan realisasi (2,94 = Sedang) dari target (3,01 = Tinggi), hal ini karena:

1. Sinergi organisasi perangkat daerah dilingkup pemerintah Kabupaten Bone
2. Adanya komitmen pimpinan daerah dan pimpinan SKPD dalam memberikan data secara valid, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan dengan baik
3. Kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya
4. Peringkat LPPD juga sangat dipengaruhi oleh inovasi yang dilakukan Kabupaten Bone, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir pemerintah daerah mampu melahirkan berbagai inovasi yang menjadi salah satu komponen pendukung dalam penilaian.
5. Kabupaten Bone berhasil menduduki peringkat 31 dari seluruh kabupaten / kota di Indonesia, hal ini dipengaruhi oleh capaian kinerja outcome maupun output yang mengalami peningkatan disemua urusan pemerintahan.

Pencapaian di atas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Pergantian ASN yang menangani LPPD sehingga belum memahami rumusan Indikator Kinerja Kunci
2. Masih ada beberapa perangkat daerah lambat dalam menyetor bahan dan data LPPD
3. Kurangnya waktu pada saat pelaksanaan Bimtek sehingga pemahaman terkait LPPD belum maksimal
4. Inkonsistensi pemanfaatan dan pengelolaan data/informasi sektoral yang mengakibatkan rumusan kebijakan pembangunan daerah tidak berkesinambungan
5. Adanya perubahan regulasi dari aturan sebelumnya yang di revisi dengan PP Nomor 13/2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah untuk meningkatkan Kategori Nasional hasil Penilaian LPPD Kabupaten antara lain:

1. Memaksimalkan pertemuan berupa Orientasi, konsinyering dan Bimtek LPPD dengan perangkat daerah pengampu kegiatan
2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi
3. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja
4. Menindak lanjuti hasil reuiu Inspektorat Daerah, Provinsi dan Tim Evaluasi Nasional
5. Percepatan penyelesaian dokumen LPPD berdasarkan tahapan dan mekanisme yang telah ditentukan

Sasaran 1.2 Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Daerah

- Tingkat Inflasi Daerah

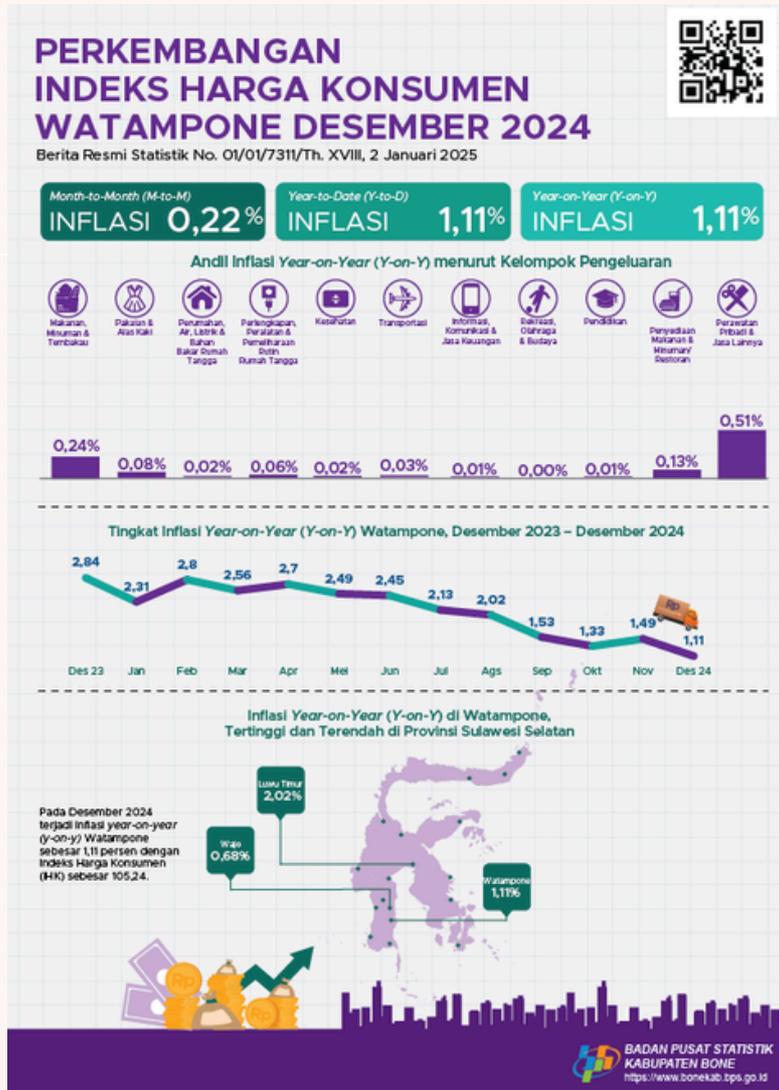
Definisi: Tingkat Inflasi Daerah ialah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu yang dihitung oleh BPS.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Tingkat Inflasi Daerah dalam kategori Sangat Berhasil, yaitu tercapai 154% dengan realisasi sebesar 1,11 dari target 2,4 hal ini karena:

1. Sinergitas antar Pemerintah Daerah, Stakeholder dan masyarakat Kabupaten Bone dalam menjaga stok dan pasokan bahan pokok serta stabilisasi harga;
2. Komitmen Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bone dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
3. Kinerja OPD dalam menjalankan program kerja yang terkait dengan Pengendalian Inflasi Kabupaten Bone;
4. Melakukan Koordinasi melalui forum Rapat Koordinasi TPID baik pusat maupun daerah yang menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi di Kabupaten Bone.

Hal ini dapat dibuktikan dengan data sebagai berikut :

Grafik 3.1



Sumber : Bagian ekonomi, BPS Kabupaten Bone Tahun 2024



Scan Barcode

Kabupaten Bone meraih penghargaan pengendalian inflasi terbaik se - Sulawesi Selatan

Pencapaian di tersebut telah Mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu :

1. Adanya kenaikan harga komoditi yang memiliki andil terbesar pada perhitungan Inflasi Kabupaten Bone.
2. Adanya keterlambatan data dan informasi terkait harga, stok dan pasokan dari instansi terkait yang beresiko terlambatnya penanganan krisis.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah untuk meningkatkan Tingkat Inflasi Daerah antara lain:

1. Mengikuti Rapat Koordinasi Nasional TPIN secara daring bersama dengan anggota TPID Kab. Bone yang dikoordinir oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.
2. Pemantauan harga dan gudang pasokan yang dikoordinir Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan data langsung.

- Nilai SAKIP Oleh APIP

Definisi: Hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Nilai SAKIP Oleh APIP dalam kategori Berhasil, yaitu tercapai 101% dengan realisasi Nilai A (80-55) dari target A (80), hal ini dikarenakan :

1. Masih ditemukan beberapa indikator kinerja Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Bone Tahun 2024 yang kurang relevan dan belum cukup untuk mengukur ketercapaian kinerja/sasaran strategis.
2. Masih ditemukan Sebagian kecil rumus perhitungan kurang sesuai dengan substansi yang ingin diukur didalam indikator kinerja.
3. Kualitas dokumen laporan kinerja Perangkat Daerah belum merata, masih ditemukan beberapa dokumen laporan kinerja Perangkat Daerah belum sepenuhnya memuat kriteria minimum substansi pelaporan kinerja sesuai PermenpanRB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, antara lain belum adanya benchmark kinerja dengan capaian level nasional, provinsi, atau kabupaten/kota terdekat (jika ada).
4. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Internal yang diterbitkan oleh inspektorat telah mengkritisi aspek kualitas dan pemanfaatan pada setiap Komponen SAKIP. Namun, catatan yang diberikan kurang mendalam dan spesifik menggambarkan titik permasalahan yang ada, khususnya terkait kualitas perencanaan dan keselarasan kinerja.



Pencapaian di atas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara Lain :

1. Masih terdapat narasi sasaran strategis baik dilevel Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah belum spesifik menjelaskan kondisi/outcome yang ingin dicapai atau belum menggambarkan peningkatan kualitas kinerja.
2. Perencanaan kinerja Sebagian Perangkat Daerah belum sepenuhnya baik. beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain sasaran strategis yang belum berorientasi outcome dan pemilihan indikator kinerja yang kurang relevan dan cukup untuk mengukur ketercapaian kinerja/sasaran.
3. Analisis efisiensi dalam Sebagian besar laporan kinerja Perangkat Daerah hanya menginformasikan perbandingan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja, belum terdapat penjelasan mendalam bentuk konkret upaya efisiensi anggaran yang dilakukan dalam mencapai kinerja.
4. Monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal Perangkat Daerah belum dilakukan secara berkala, sehingga progress perbaikan belum terkawal secara berkelanjutan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah untuk meningkatkan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah antara lain:

1. Proses penerapan SAKIP di Kabupaten Bone sudah menyentuh semua perangkat daerah, terdiri dari 40 (Dinas, Badan, RSUD, Sekretariat), dan 27 Kecamatan, selanjutnya penerapan SAKIP mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi sudah menggunakan aplikasi SIPAKAINGE (Sistem Pelaporan Akuntabilitas Perangkat Daerah) yang senantiasa dilakukan penyempurnaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Selanjutnya dalam proses perencanaan SAKIP pada Pemerintah Kabupaten Bone telah kami selaraskan cascading kinerja dari RPJMD dan Renstra OPD, dari kepala OPD sampai staf melalui momentum perubahan RPJMD Kabupaten Bone periode 2018-2023 dan renstra RPD 2024-2026 perangkat daerah, begitu juga untuk pohon kinerja di lingkup perangkat daerah kabupaten bone telah tergambarkan sampai pada level staf, sehingga menunjukkan keselarasan kinerja individu dengan kinerja organisasi.
3. Selanjutnya proses pengukuran, capaian kinerja kepala perangkat daerah sampai staf, telah dilakukan pengukuran terhadap perjanjian kerjanya yang dituangkan dalam rencana aksi dan diukur per- triwulan, sebagai bentuk pengendalian terhadap capaian kerjanya.
4. Pada proses pelaporan kinerja, Pemerintah Kabupaten Bone juga tiap tahun melaksanakan bimtek terhadap aparatur yang menangani pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang langsung dibina oleh Kemenpan RB dan Inspektorat Provinsi Sulsel, sehingga dari hasil bimtek ini, dapat menyajikan laporan kinerja yang memuat analisis yang lengkap dan memadai, yang dapat disajikan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan monitoring pencapaian sasaran RPJMD dan renstra OPD.
5. Evaluasi internal dari APiP juga kami lakukan per-triwulan, dan dalam hal ini kami (Bupati) langsung memimpin dan memonitoring tindak lanjut evaluasi yang dilakukan oleh semua perangkat daerah,

dan yang tidak kalah penting penerapan sakip pada pemerintah kabupaten bone juga dijadikan sebagai dasar pemberian reward and punishment, dan tambahan penghasilan PNS telah memiliki korelasi dengan capaian kerjanya.

- Survey kepuasan Masyarakat (IKM)

Definisi: Hasil survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Survey kepuasan Masyarakat (IKM) dalam kategori Berhasil, yaitu tercapai 106% dengan realisasi Nilai B (80.87) dari target B (76.61-88.30), hal ini karena:

- Kurangnya perhatian bagi unit pelayanan public yang dijadikan lokus survey kepuasan Masyarakat bahwa skm yang dilakukan penting untuk mengetahui Tingkat kepuasan Masyarakat yang diberikan layanan.

Pencapaian di atas memenuhi target sesuai yang ingin dicapai, walaupun terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Masih adanya responden yang masih minim pengetahuan pengetahuan terkait pelayanan yang berbasis elektronik.
2. Masih ada persepsi masyarakat yang menganggap SKM yang dilakukan hanyalah formalitas

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah untuk meningkatkan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah antara lain:

1. Survei kepuasan masyarakat untuk tahun 2024 akan di berlakukan beberapa unit pelayanan public yang akan di jadikan sampel
2. Survei kepuasan masyarakat untuk tahun ini akan dilakukan secara triwulan



6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Sekretariat Daerah Kabupaten Bone dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah Kabupaten Bone adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan 2024 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Sekretariat Daerah Kabupaten Bone dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan:

Tabel 3.6
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Sumber Daya %
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	b	c	d	e (d/c x100%)	f	g	h (g/f x 100%)	i (e-h)
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Sekretariat Daerah Yang Baik Dan Bersih Serta Layanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi								
Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang Profesional	Kategori Nasional hasil Penilaian LPPD Kabupaten	(3,01) = Tinggi	(2,94) = Sangat Tinggi	98%	11,388,471,800.00	9.824.251.541,00	86%	11%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Oleh APIP	A (80)	A (80,55)	101%	29,442,026,073.00	28.129.977.219,00	96%	8%
	Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (76,61-88,30)	B(80,87)	106%				
Mewujudkan Stabilitas Prekonomian Daerah								
Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Daerah	Tingkat Inflasi Daerah	4.1	1.11	154%	1,411,235,840.00	1.272.134.649,00	90%	64%
Rata-rata				114%			92,86%	28%

Sumber Data: Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Kabupaten Bone terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. Indikator Kategori Nasional hasil Penilaian LPPD Kabupaten dengan capaian kinerja 98 % dan capaian anggaran 86%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 14% dan efisien penggunaan sumber daya sebesar 11%
2. Indikator Tingkat Inflasi Daerah dengan capaian kinerja 154% dan capaian anggaran 90%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 10% dan efisien penggunaan sumber daya sebesar 64%.
3. Indikator Nilai SAKIP Oleh APJP dengan capaian kinerja 101% dan capaian anggaran 96%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 4% dan efisien penggunaan sumber daya sebesar 8%.
4. Indikator Survey kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja 106 % dan capaian anggaran 96%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 4% dan efisien penggunaan sumber daya sebesar 8%.



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone sebagai berikut:

Tabel 3.7

Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

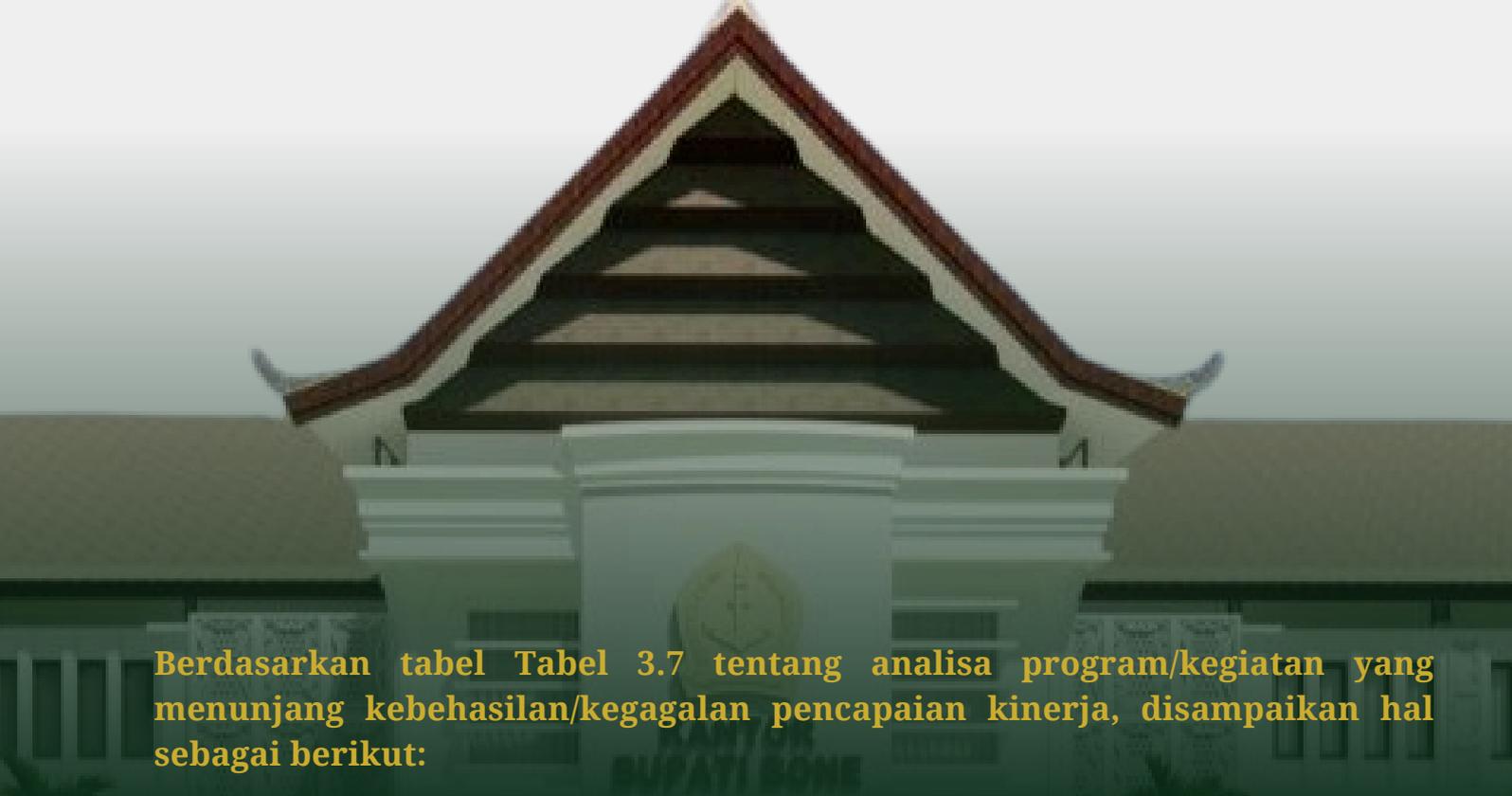
NO	TUJUAN / SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / (OUTPUT) / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN KINERJA	TARGET		REALISASI		PRESENTASE REALISASI (%)	
					KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Sekretariat Daerah Serta Layanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi		Indeks Reformasi Birokrasi							
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah		Nilai SAKIP Oleh APIP	Nilai	A (80-90)	42.241.733.713,00	A (80,55)	39.226.363.409,00	101%	92,86%
			Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	B (76,61-88,30)		A (80,87)		106%	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Ketersediaan Bahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PERSEN	100%	29.442.026.073,00	89%	28.117.163.538,00	89%	96%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PERSEN	100%	303.138.500,00	100%	302.558.580,00	100%	100%
		Pengusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	131.443.000	5	131.443.000,00	100%	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	Dokumen	2	35.000.000	2	34.950.180,00	100%	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	Dokumen	1	25.000.000	1	24.815.100,00	100%	99%
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	Dokumen	1	25.000.000	1	24.939.200,00	100%	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	Dokumen	1	30.000.000	1	29.944.500,00	100%	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	28.857.000	1	28.776.900,00	100%	100%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	27.838.500	4	27.689.700,00	100%	99%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PERSEN	100%	11.643.422.382,00	100%	11.516.869.715,00	100%	99%
		Pengediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1372	10.627.710.482	1350	10.575.352.657,00	98%	100%
		Pengediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Pengediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	501.594.700	12	501.425.900,00	100%	99%

NO	TUJUAN / SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN KINERJA	TARGET		REALISASI		PRESENTASE REALISASI (%)	
					KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	544	86.395.200	544	85.838.590,00	100%	99%
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	144	312.722.000	144	241.682.368,00	100%	77%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	25.000.000	1	24.987.500,00	100%	100%
		Pengelolaan dan Penjiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	3	25.000.000	3	25.000.000,00	100%	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Laporan	18	65.000.000	18	64.914.100,00	100%	100%
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	PERSEN	100%	302.960.000,00	100%	284.452.128,00	100%	94%
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	302.960.000	3	284.452.128,00	100%	94%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	PERSEN	100%	8.072.189.790,00	96%	7.823.738.792,00	96%	97%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Paket	4	139.965.800	3	118.522.400,00	75%	85%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	44.574.000	5	44.115.000,00	100%	99%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	60	3.937.480.840	60	3.851.058.490,00	100%	98%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	97.771.150	24	72.822.400,00	100%	74%
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36	1.327.330.000	36	1.317.410.000,00	100%	99%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	140	2.525.068.000	140	2.419.810.502,00	100%	96%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	PERSEN	100%	49.500.000,00	100%	48.640.000,00	50%	98%
		Pengadaan Pakaian Dinas & Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	49.500.000	3	48.640.000,00	100%	98%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	-	0	-	0%	0%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintahan	PERSEN	100%	108.966.000,00	17%	105.750.000,00	17%	97%
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan yang Disediakan	Unit	0	-	0	-	0%	0%
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	28.620.000	2	26.250.000,00	20%	92%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	80.346.000	3	79.500.000,00	30%	99%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	PERSEN	100%	2.638.158.130,00	132%	2.564.819.042,00	132%	97%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4000	197.847.150	7835	173.717.000,00	196%	88%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	144.739.380	24	117.226.860,00	100%	81%

NO	TUJUAN / SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN KINERJA	TARGET		REALISASI		PRESENTASE REALISASI (%)	
					KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)
		Pengediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pengediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.295.511.600	12	2.273.875.182,00	100%	99%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PERSEN	100%	2.438.611.400,00	119%	2.203.633.261,00	119%	90%
		Pengediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	31	513.370.000	58	450.850.633,00	187%	88%
		Pengediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	135	1.660.599.300	140	1.543.318.908,00	104%	93%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	13	179.040.000	13	165.383.500,00	100%	92%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	85.602.100	5	43.980.220,00	83%	51%
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PERSEN	100%	1.030.767.771,00	50%	605.000.000,00	50%	59%
		Pengediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Orang/Bulan	12	180.117.520	0	-	0%	0%
		Pengediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Orang/Bulan	12	180.117.520	0	-	0%	0%
		Pengediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pasang Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya KDH dan WKDH	Pasang	74	150.000.000	74	150.000.000,00	100%	100%
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Medical Check Up Untuk KDH dan WKDH	Orang	2	100.650.000	0	-	0%	0%
		Pengediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil	Jumlah Realisasi Pembayaran Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH Per Bulan	Bulan	12	600.000.251	12	455.000.000,00	100%	76%
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	PERSEN	100%	869.997.400,00	67%	841.977.400,00	67%	97%
		Pengediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	4	533.997.400	4	533.997.400,00	100%	100%
		Pengediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	0	-	0	-	0%	0%
		Pengediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang	Paket	4	336.000.000	4	307.980.000,00	100%	92%
		Penataan Organisasi	Persentase Realisasi Penataan Administrasi Kelembagaan	PERSEN	100%	838.039.200,00	100%	668.418.337,00	100%	80%
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	2	280.618.000	2	181.986.779,00	100%	65%
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	2	241.926.800	2	203.920.250,00	100%	84%
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	2	315.494.400	2	282.511.308,00	100%	90%
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	PERSEN	100%	1.146.275.500,00	98%	1.138.197.187,00	98%	99%

NO	TUJUAN / SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN KINERJA	TARGET		REALISASI		PRESENTASE REALISASI (%)	
					KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)
		Fasilitasi Keprotokolanan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolanan	Laporan	277	672.672.000	272	667.314.771,00	98%	99%
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	277	234.984.500	265	232.571.900,00	96%	99%
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	12	178.619.000	12	178.310.516,00	100%	100%
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang		Kategori Penilaian Nasional Hasil LPPD Kabupaten	Kategori	(3,01) = Tinggi	11.388.471.800,00	(2,94) = Sedang	9.724.968.541,00	98%	85%
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Ketersediaan Bahan Perumusan, Pengekoordinasian Pelaksanaan Tugas, Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Dibidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.	PERSEN	100%	11.388.471.800,00	93%	9.724.968.541,00	93%	85%
		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Tata	PERSEN	100%	798.559.200,00	100%	778.987.915,00	100%	98%
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	1	115.832.000	1	115.487.200,00	100%	100%
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	1	183.309.100	1	182.955.670,00	100%	100%
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	3	499.418.100	3	480.545.045,00	100%	96%
		Pelaksanaan Kebijakan	Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	PERSEN	100%	9.593.371.600,00	100%	8.072.124.500,00	100%	84%
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	10	9.506.811.100	10	7.998.391.800,00	100%	84%
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	1	50.167.500	1	44.970.300,00	100%	90%
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan,	Dokumen	1	36.393.000	1	28.762.400,00	100%	79%
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	PERSEN	100%	672.476.000,00	72%	650.421.526,00	72%	97%
		Fasilitasi Penyusunan Produk	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	39	301.926.250	39	301.041.625,00	100%	100%
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	15	216.410.150	10	196.605.350,00	67%	91%
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	39	154.139.600	19	152.774.551,00	49%	99%
		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Perjanjian Kerjasama Daerah Yang	PERSEN	100%	324.065.000,00	100%	322.717.600,00	100%	100%
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	7	122.126.200	7	121.655.800,00	100%	100%
		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	10	107.545.300	10	107.326.700,00	100%	100%
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	1	94.393.500	1	93.735.100,00	100%	99%

NO	TUJUAN / SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN KINERJA	TARGET		REALISASI		PRESENTASE REALISASI (%)	
					KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)
	Mewujudkan Stabilitas Perekonomian Daerah		Tingkat Inflasi Daerah							
1	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Daerah		Tingkat Inflasi Daerah	Tingkat	2,4	1.411.235.840,00	1,11	1.272.962.249,00	154%	90%
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Ketersediaan Bahan Perumusan Pengoordinasi Pelaksanaan Tugas, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan	PERSEN	100%	1.411.235.840,00	99%	1.272.962.249,00	90%	90%
		Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	PERSEN	100%	449.048.070,00	100%	359.046.520,00	100%	80%
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	2	105.979.850	2	71.380.200,00	100%	67%
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	6	240.172.720	6	197.391.320,00	100%	83%
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro	Dokumen	4	102.895.500	4	90.275.000,00	100%	88%
		Fasilitasi Penjurusan Program	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	PERSEN	100%	294.086.000,00	100%	263.729.000,00	100%	90%
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penjurusan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	2	85.297.000	2	76.492.600,00	100%	90%
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	13	119.219.800	13	108.522.200,00	100%	91%
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	5	89.569.200	5	78.714.200,00	100%	88%
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	5	89.569.200	5	78.714.200,00	100%	88%
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	PERSEN	100%	385.148.020,00	119%	368.166.269,00	119%	96%
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	12	32.195.600	12	31.429.100,00	100%	98%
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan	Dokumen	132	103.578.000	132	98.734.664,00	100%	95%
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	18	249.374.420	28	238.002.505,00	156%	95%
		Pemantauan Kebijakan Sumber	Persentase Ketersediaan Data Informasi Sumber Daya Alam	PERSEN	100%	282.953.750,00	78%	281.192.860,00	78%	93%
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal,	Dokumen	3	106.574.250	1	105.825.130,00	33%	99%
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan,	Dokumen	1	96.467.000	1	95.745.330,00	100%	99%
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,	Dokumen	1	79.912.500	1	79.622.400,00	100%	100%
		TOTAL			100%	42.241.733.713,00	94%	39.115.094.328,00	91%	90%



Berdasarkan tabel Tabel 3.7 tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatkan kualitas tata kelola sekretariat daerah yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

Sasaran 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang Profesional

Indikator 1: Kategori Nasional hasil Penilaian LPPD Kabupaten

dengan target 100% telah Berhasil tercapai sebesar 98%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Sasaran 2: Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang Profesional

Indikator 2.1: Nilai SAKIP Oleh APIP

Nilai SAKIP Oleh APIP dengan target 100% telah Berhasil tercapai sebesar 101%.

Indikator 2.2: Survey kepuasan Masyarakat (IKM)

Sedangkan Survey kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 100% Berhasil sebesar 106% Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuan 2: Mewujudkan Stabilitas Prekonomian Daerah

Sasaran 3 : Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Daerah

Indikator 3.1 : Tingkat Inflasi Daerah dengan target 100% telah Sangat Berhasil tercapai sebesar 154%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Perekonomian Dan Pembangunan

Upaya Perbaikan Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone pada tahun 2024 dengan melalui 7 analisis capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapain kinerja tahun berikutnya, yaitu:

Tujuan 1: Meningkatkan kualitas tata kelola sekretariat daerah yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

Tujuan 2: Mewujudkan Stabilitas Prekonomian Daerah

Sasaran 1: Meningkatkan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang Profesional

1. Melakukan Kunjungan dan koordinasi dengan Panitia Masjid yang telah memasukkan proposal bantuan dana untuk segera mencairkan dananya ke Bagian Kesejahteraan Rakyat.
2. Melakukan orientasi dan Bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas pengampu kegiatan
3. Melakukan konsinyering kepada semua perangkat daerah dengan pembagian jadwal untuk mengecek kembali tingkat validasi data

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Sasaran 2: Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Daerah

1. Meningkatkan pemantauan dan inventarisasi potensi sumber daya alam dengan turun langsung ke Kecamatan

Sasaran 3: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah

1. Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP
2. Penyusunan Perjanjian kinerja akan dilakukan sampai ke level staf sehingga pengukuran kinerja bisa sampai ke level individu
3. Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dengan tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan dalam pencapaian target dan capaian kinerja belum tercapai secara maksimal
4. Melakukan Sosialisasi untuk mendorong Partisipasi Masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja



B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 setelah perubahan sebesar **Rp. 42.241.733.713** (Empat Puluh Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah) sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran

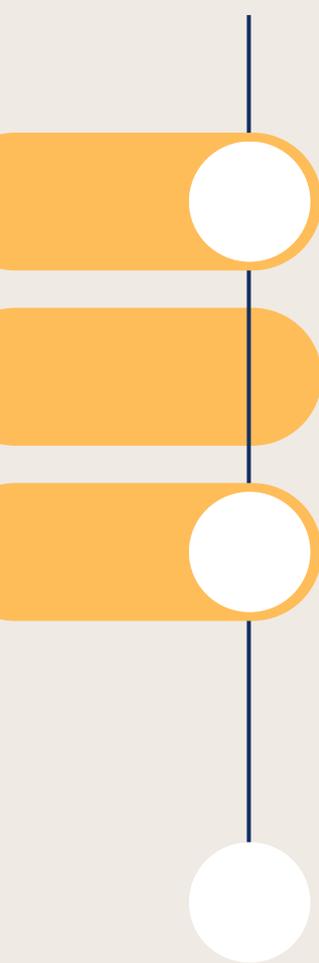
Uraian	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4
<i>Tujuan 1 Meningkatkan kualitas tata kelola sekretariat daerah yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi</i>	-	-	-
Sasaran 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang Profesional			
Program:			
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	11,388,471,800.00	9.824.251.541,00	86,26%
Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah			
Program:			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29,442,026,073.00	28.129.977.219,00	95,54%
<i>Tujuan 2 Menwujudkan Stabilitas Prekonomian Daerah</i>	-	-	-
Sasaran 3 Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Daerah			
Program:			
• Program Perekonomian Dan Pembangunan	1,411,235,840.00	1.272.134.649,00	90,14%
Total	42,241,733,713.00	39,115,094,328.00	92,86%

Sumber Data: Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024



BAB IV

PENUTUP



A. KESIMPULAN UMUM

**B. KENDALA PELAKSANAAN DAN
UPAYA MENGATASI**

C. LAMPIRAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
banasa**

A.KESIMPULAN

UMUM

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone perlu adanya Akuntabilitas kinerja yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapaidalam bentuk sasaran dapat terukur dan dapat diuji.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Perubahan Tahun 2024-2026 dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perubahan Tahun 2024-2026. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone 2024-2026.

Matriks Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bone dalam mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Bone periode 2018-2023 adalah "Masyarakat Kabupaten Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera (MaBeSSa)".

Sedangkan Misinya :

- 1.Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih danbebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- 2.Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- 3.Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
- 4.Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
- 5.Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
- 6.Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum,dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Berdasarkan keenam Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tersebut, Sekretariat Daerah berupaya mendukung Misi yang pertama,yaitu "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)". Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana diatas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang mencakup 4 indikator sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 dengan 1 Indikator Sasaran

Capaian indikator Kategori Nasional hasil Penilaian LPPD Kabupaten dalam kategori Berhasil, yaitu tercapai 98% dengan realisasi (2,94 = Sedang) dari target (3,01 = Tinggi).

2. Sasaran Strategis 2 dengan 1 Indikator Sasaran

Capaian indikator Tingkat Inflasi Daerah dalam kategori Sangat Berhasil, yaitu tercapai 154% dengan realisasi sebesar 1,11 dari target 2.4

3. Sasaran Strategis 3 dengan 3 Indikator Sasaran

Capaian Indikator :

- a. Capaian Indikator Nilai SAKIP Oleh APIP dalam kategori Berhasil, yaitu tercapai 101% dengan realisasi (A = 80,55) dari target (A = 80).
- b. Capaian Indikator Survey kepuasan Masyarakat/IKM dalam kategori Tidak Baik, yaitu tercapai 106% dengan realisasi (B = 80,87) dari target (B = 76,61)

Dari uraian Ikhtisar Pencapaian Capaian Kinerja 2024 diatas terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang mencakup 4 (empat) Indikator kinerja, maka dapat diketahui bahwa, 3 (tiga) Indikator kinerja dalam predikat Berhasil yakni Kategori Nasional hasil Penilaian LPPD Kabupaten dengan capaian kinerja 98%, Nilai SAKIP Oleh APIP dengan capaian kinerja 101% dan Kategori Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian Kinerja 106%. 1 (satu) indikator dalam predikat Sangat Berhasil yakni Tingkat Inflasi Daerah dengan capaian kinerja 154%. Dengan demikian Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone pada tahun 2024 dengan Rata-Rata Capaian Kinerja 114% telah Mencapai **Sangat Berhasil**.

B. KENDALA PELAKSANAAN DAN UPAYA MENGATASI

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Sekretariat Daerah juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2024, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2024 adalah baik, karena terdapat 3 indikator memenuhi kriteria memenuhi target (berhasil) dan 1 melampaui target (Sangat berhasil) 1 indikator cukup berhasil.

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2024, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Sekretariat Daerah ke depan adalah peningkatan akuntabilitas kinerja yang lebih baik.

Bagi instansi di lingkungan Sekretariat Daerah sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Sekretariat Daerah untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa Indikator yang dicantumkan dalam Renstra RPD Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi.



LAMPIRAN

1. MATRIKS RENSTRA



Scan Barcode

4. PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA AKSI



Scan Barcode

2. CASCADING KINERJA



Scan Barcode

5. PENGHARGAAN



Scan Barcode

3. PERJANJIAN KINERJA



Scan Barcode

6. TABEL LKJIP 2024



Scan Barcode



KALEIDOSKOP KALEIDOSKOP

Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



JANUARI 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



Rapat Orientasi Penyusunan LPPD, LKPJ Dan RLPPD Kabupaten Bone Tahun 2023.



penganugerahan Reformasi Birokrasi (RB) Awards Tahun 2023. Penganugerahan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja Serentak Tahun 2024 disaksikan langsung oleh Pj. Bupati Bone, Sekda Bone dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kab. Bone.

REBRUARI 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
**# bangga
melayani
bangsa**



Rapat Persiapan pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Bone (HJB) ke - 694 Tahun 2024 di Gedung PKK Kab. Bone



Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

MARET 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



Exit Meeting Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulsel.



Tamu



Rapat Kordinasi Pengendalian Inflasi Dirangkaikan Dengan Rapat Kordinasi HBKN Puasa dan Idul Fitri tahun 2004

APRIL 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



Rapat dalam rangka optimalisasi penyusunan Laporan Laporan Evaluasi Kinerja Penjabat Bupati Bone Triwulan II Tahun 2024.



Gerakan pangan murah dilaksanakan serentak di Indonesia, kegiatan ini pun tersambung secara virtual dengan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan., Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

MEI 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



Pj. Bupati Bone Drs. H. A. Islamuddin, M.H. Menerima Penghargaan Dari Gugus Tugas Reforma Agraria Atas Capaian Pemerintah Kabupaten Bone Dengan Kontribusi Teraktif Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Tahun 2023.



menyambut Bupati sabu raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur Drs. Nikodemus N Rihi Heke, M.Si dalam Rangka Kunjungan Kerja bersama rombongan

JUNI 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
#melayani
#bangsa**



Pj. Bupati Bone Drs. H. Andi Islamuddin, M.H., menghadiri Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2024.



Dinilai sebagai Kabupaten terbaik dalam mengendalikan Inflasi, Pemerintah Kabupaten Bone meraih penghargaan pengendalian inflasi terbaik se - Sulawesi Selatan yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo.

Penghargaan diberikan saat momen Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dan Tim Pengendali Inflasi Daerah Award Tahun 2024 diterima langsung oleh Pj. Bupati Bone Drs. H. Andi Islamuddin, M.H., di di Istana Negara, Jakarta Jum'at 14 Juni 2024.

JULI 2024

Dalam rangka Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024 oleh Ombudsman, Tim Evaluator Pelayanan Publik Kabupaten Bone melakukan Pendampingan ke Unit Penyelenggara Pelayanan, pada hari Selasa, 9 Juli 2024.



Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

AGUSTUS 2024



Pj Bupati Bone Andi Winarno Eka Putra, S.STP., M.H. Menerima Kunjungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone Di Rumah Jabatan Bupati Bone



Pj. Bupati Bone Pj. Bupati Bone Andi Winarno Eka Putra, S.STP., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi implementasi kebijakan Menteri PANRB bidang kelembagaan dan tata laksana dengan tema “Kelembagaan yang Agile Melalui Digitalisasi Pemerintahan” di Hotel Four Points by Sheraton Makassar Jl. Andi Djemma No.130, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Senin, 26 Agustus 2024.



Pj Bupati Bone Andi Winarno Eka Putra, S.STP., M.H. Menerima Kunjungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone Di Rumah Jabatan Bupati Bone

SEPTEMBER 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



Pj Bupati Bone Andi Winarno Eka Putra, S.STP.,M.H Di dampingi PLT Kepala Bapenda Drs. Andi Gunadil Ukra, M.M., Memimpin Rapat Monitoring & Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kab. Bone.



Pj Bupati Bone Andi Winarno Eka Putra, S.STP., M.H., mengikuti Rapat Koordinasi pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024 Secara virtual.

Pj. Bupati Bone Andi Winarno Eka Putra, SSTP., M.H., mengikuti Rapat Koordinasi pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024 Secara virtual.

OKTOBER 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
**#bangga
melayani
bangsa**



Penandatanganan perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 dan orientasi penyusunan laporan evaluasi kinerja pejabat Bupati.

NOVEMBER 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



Rapat Konsinyering dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman dan penjelasan teknis kepada seluruh perangkat daerah terkait tahapan dan mekanisme penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan DPRD Kabupaten Bone 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;



Pj. Bupati Bone Andi Winarno Eka Putra, S.STP., M.H. Menghadiri serta Membuka Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri tentang Kerangka Acuan Kerja (KAK).

"Mitigasi Resiko Dalam Penyusunan KAK Untuk Mewujudkan Laporan Yang Transparan Dan Akuntabel"

DESEMBER 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
#melayani
#bangsa**



Melakukan pemantauan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok Secara Terpadu Dalam Rangka Menekan Inflasi.



Rapat Evaluasi Ranperda dan Ranperkada APBD TA. 2025

